

Relasi Ide dan Praktik Geopolitik: Analisis Diskursus mengenai Kaitan Neo-Eurasianisme dan Aneksasi Krimea tahun 2014

Athaya Aushafina
Universitas Airlangga

Abstrak

Penelitian ini mencari tahu hubungan dan pengaruh yang dimiliki diskursus geopolitik dalam konteks formal terhadap geopolitik praktis, spesifiknya hubungan kausal di antara keduanya yang menjelaskan proses atau mekanisme bagaimana ide-ide geopolitik dapat memengaruhi praktik pembuatan kebijakan luar negeri. Hubungan kausal tersebut penting untuk dicari karena secara implisit terdapat konsensus dalam pemahaman geopolitik secara konvensional bahwa ide-ide yang dirumuskan oleh perumus teori memiliki kaitan yang erat dan pengaruh yang besar terhadap kebijakan yang diformulasikan dan diimplementasikan pembuat kebijakan. Penjelasan mengenai mekanisme dan proses dalam hubungan tersebut dan bagaimana ide memengaruhi praktik secara spesifik dalam konteks geopolitik dijelaskan dengan menggunakan teori konstruktivisme aspirasional. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, penelitian ini menggunakan metode analisis diskursus mengenai Neo-Eurasianisme di Rusia dalam kaitannya dengan aneksasi Krimea pada tahun 2014.

Kata kunci: Geopolitik Kritis, Konstruktivisme Aspirasional, Rusia, Neo-Eurasianisme, Aneksasi Krimea, konstruktivisme.

This article seeks to find the relation between formal geopolitical discourses and practical geopolitical reasoning, specifically the causal relation between the two which explains the process or mechanism of how geopolitical ideas may influence the practice of foreign policy-making. This causal relation is important because the general consensus implicit in the conventional understanding of geopolitics claims that ideas formulated by theoreticians are closely related and highly influential to the policies created and implemented by policymakers. Further explanation regarding the mechanism and processes involved in how ideas and practice relate, specifically in the context of geopolitics, is done using the aspirational constructivism theory. In answering the research question, the method of discourse analysis is used in analyzing Neo-Eurasianism as a geopolitical idea as it relates to the Russian Federation's annexation of Crimea in 2014.

Keywords: Critical geopolitics, Aspirational Constructivism, Russia, Neo-Eurasianisme, Annexation of Crimea, Constructivism.

Geopolitik dapat dikatakan merupakan salah satu faktor determinan bagi pembentukan kebijakan luar negeri. Dipahami sebagai diskursus yang mendeskripsikan, menjelaskan, dan mempromosikan cara-cara tertentu dalam memandang bagaimana kekuatan dibentuk dan dialami secara teritorial (Kearns, 2003), berfokus pada bagaimana tempat-tempat asing direpresentasikan dalam diskursus kebijakan luar negeri (Dodds, 1993), sejak awal mula konsepsinya, geopolitik telah memiliki kaitan yang erat dengan kajian Hubungan Internasional dan praktiknya, mengingat kedua kajian tersebut muncul pada saat yang hampir bersamaan. Sebelum istilah “geopolitik” sendiri muncul, pengaruh lingkungan dan alam terhadap kehidupan manusia dan kebutuhan ekonomi maupun militer dari suatu negara telah menjadi objek penyelidikan. Pemahaman deterministik mengenai sifat alami manusia yang dibentuk oleh filsuf dan akademisi yang disebut Ladis K. D. Kristof (1960) ‘pra-modern’ telah mendominasi diskursus terkait konsep geopolitik sejak pembentukannya. Kondisi alam dipandang sebagai elemen objektif yang memiliki pengaruh signifikan dalam pengelolaan kehidupan manusia dan dianggap sebagai faktor determinan dalam menentukan nasib manusia, sehingga geopolitik pra-modern cenderung bersifat serupa dengan ilmu pengetahuan alam yang objektif, amoral, serta apolitis.

Hal tersebut melatarbelakangi lahirnya apa yang kini dipahami sebagai geopolitik klasik. Konsepsi geopolitik klasik identik dengan aktivitas yang dilakukan oleh tokoh-tokoh negarawan. Titik balik bagi geopolitik dan awal mula diskursus geopolitik klasik terjadi ketika Sir Halford Mackinder memberikan pidato kepada Royal Society of Geographers di London, Inggris, dimana Mackinder tidak hanya menginkorporasikan peta dan pemahaman geografis dalam kajian politik internasional, namun juga menyoroti kajian geopolitik sebagai bagian dari kajian akademis untuk pertama kalinya (Fettweis, 2015). Mackinder sendiri telah didahului oleh Rudolf Kjellen pada tahun 1899 yang mencetuskan istilah “geopolitik”, dan ide-ide Mackinder sendiri pun merupakan respon terhadap ide-ide geopolitik Alfred Thayer Mahan yang menyatakan bahwa dominasi dunia dapat dicapai melalui kontrol terhadap samudra. Konsep heartland Mackinder terbentuk dari pandangan bahwa kontrol terhadap daratan lebih krusial daripada lautan bagi calon negara-negara ekspansionis. Ide-ide Mackinder di kemudian hari dikembangkan oleh tokoh-tokoh seperti Nicholas Spykman dengan teori *rimland*, dan lain-lain (Fettweis, 2015).

Geopolitik dipahami sebagai berkaitan erat dengan geografi strategik, yang pembahasannya terkait erat dengan bagaimana area-area secara spasial dapat dikontrol dan diakses, serta bagaimana hal-hal tersebut dapat berdampak pada keamanan dan kesejahteraan suatu bangsa (Owens, 2015). Hal tersebut mendasari alasan dijadikannya geopolitik sebagai bentuk *geographic reasoning* dalam politik internasional, dan bentuk konkrit pengaruh ide-ide klasikal geopolitik dalam hal ini dapat dilihat pada periode perang dari strategi-strategi besar yang dibentuk dan diimplementasikan negara. Dalam hal ini terdapat beberapa contoh ide-ide geopolitik klasik yang dampaknya terhadap kebijakan luar negeri dapat diamati. Ide-ide Sir Halford Mackinder pada tahun 1904 mengenai heartland dan signifikansinya terhadap kebijakan merupakan salah satu contoh. Mackinder berbicara mengenai makna penting kawasan Rusia secara strategik sepanjang sejarah, menyebutnya *heartland* yang merupakan area pivot yang dalam sejarahnya selalu menjadi wilayah penentu dalam peristiwa-peristiwa global yang signifikan (Mackinder, 1904). Dalam tulisannya tersebut, Mackinder menanggapi perkembangan dalam teknologi transportasi dengan dibangunnya jalur kereta api lintas-benua, dimana hal tersebut berkontribusi dalam menjadikan *landpower* lebih krusial dibandingkan *seapower*, sebagaimana yang sebelumnya telah dinyatakan oleh Alfred Thayer Mahan (Tuathail, 1992). Berdasarkan pandangan

tersebut, penguasaan terhadap *heartland* sebagai kawasan pusat Eurasia dengan signifikansi stratejiknya menjadi penting dalam mencapai maupun mempertahankan keunggulan negara (Flint, 2006). Meskipun Mackinder menulis dalam konteks strategi Inggris dalam menghadapi tantangan Jerman pra-Perang Dunia I, konsep *heartland* Mackinder menjadi dasar intelektual dalam strategi-strategi Perang Dingin dan pendukung North Atlantic Treaty Organization (NATO). Signifikansi wilayah *heartland*, yang pada periode pasca-Perang Dunia II berkorespondensi dengan wilayah Uni Soviet menjadikan tulisan-tulisan Mackinder sentral dalam pembentukan kebijakan luar negeri Amerika Serikat selama periode Perang Dingin dan menginformasi kebijakan Amerika Serikat dalam menghentikan ekspansi Uni Soviet (Tuathail, 1992).

Dapat disimpulkan dari contoh-contoh yang telah disebutkan bahwa geopolitik dan ide-ide mengenai geopolitik yang muncul dalam ranah akademik memiliki signifikansi dalam pembuatan kebijakan luar negeri dan menginformasi pembuat kebijakan. Terdapat konsensus umum dalam literatur geopolitik bahwa terdapat beragam faktor yang memengaruhi formulasi kebijakan luar negeri dan strategi nasional secara umum, dengan geografi sebagai salah satu variabel yang paling berpengaruh (Owens, 2015). Geografi secara khusus menjadi penting dalam hubungan internasional sebagai ilmu pengetahuan deskriptif mengenai dunia yang pada tingkatan paling mendasar mendefinisikan aktor-aktor dalam hubungan internasional, kepentingan-kepentingan yang mendasari interaksi, dan tolok ukur bagi tiap aktor untuk menilai keamanan mereka relatif terhadap aktor lain. Maka itu, deskripsi mengenai dunia yang melibatkan pengetahuan geografis menjadi sentral dalam pertimbangan-pertimbangan pembuat kebijakan (Tuathail, 1992).

Bagaimanapun, terdapat diskoneksi dalam kaitan antara perumus teori dan ide-ide atau konsep yang dimunculkan dengan implementasinya dalam kebijakan luar negeri secara praktis. Sebagaimana yang ditulis oleh G. R. Sloan (1988), geopolitik secara umum telah memiliki pengaruh terhadap pembuat kebijakan sebagai semacam kredo, namun hubungan langsung antara pembuat teori dengan pembuat kebijakan belum jelas terdefinisi. Konsensus mengenai peran geografi dalam perumusan kebijakan dan signifikansi geopolitik dalam pertimbangan pembuat kebijakan luar negeri terdefinisi dengan jelas di dalam literatur geopolitik yang berkembang, namun belum ada penjelasan yang spesifik mengenai proses-proses atau mekanisme yang menghubungkan rumusan teori-teori dan konsep geopolitik yang lebih bersifat akademis dengan pembentukan atau implementasi kebijakan atau strategi negara yang bersifat lebih praktis. Spesifiknya mekanisme kausal yang menghubungkan kajian akademis dan konseptual geopolitik dengan aplikasi geopolitik secara praktis dalam kebijakan luar negeri. Apabila geopolitik dipandang sebagai kerangka berpikir yang bersifat deskriptif karena dapat membantu memahami dunia secara keseluruhan, serta preskriptif karena dapat menyarankan *strategic course of action* (Owens, 2015), maka proses-proses yang mengaitkan antara deskripsi geopolitik yang terbentuk dengan preskripsinya terhadap kebijakan menjadi aspek yang penting, dan pertanyaan mengenai apakah deskripsi-deskripsi geopolitik menjadi sebab atau justifikasi bagi kebijakan-kebijakan luar negeri yang dibentuk relevan untuk dipertanyakan.

Tradisi pemikiran geopolitik mengindikasikan adanya hubungan kausal antara geopolitik formal dan praktis, bagaimanapun penelitian mengenai hal tersebut yang menghasilkan penjelasan mengenai spesifikasi mekanisme atau proses yang menghubungkan geopolitik formal dengan praktis belum terlalu banyak dilakukan. Penelitian ini berupaya untuk mencari tahu secara spesifik proses atau mekanisme yang terlibat dalam pembentukan kebijakan luar negeri, khususnya dalam

kaitannya dengan geopolitik dan bagaimana ide-ide geopolitik memengaruhi praktik-praktik geopolitik negara. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan geopolitik kritis sebagai titik keberangkatan awal. Geopolitik kritis secara aktif mengkritisi dan menolak proposisi geopolitik klasik. Dimana geopolitik klasik memandang geografi sebagai representasi fakta dan merupakan kebenaran yang objektif dan signifikan secara strategik, geopolitik kritis menolak hal tersebut. Geopolitik kritis tidak menyamakan 'geografi' dengan 'alam', dan mengenali bahwa geografi tidak dapat dipungkiri merupakan proses sosial dan politik yang terlibat dalam penggambaran bumi, atau secara harfiah merupakan "*geo-graphing*" (Tuathail, 1999). Dalam kata lain geografi merupakan proses pemberian makna yang tidak dapat dipisahkan dari budaya dan politik, sehingga konsekuensinya bagi kajian geopolitik adalah bahwa geopolitik merupakan bentuk pemikiran mengenai makna-makna geografis dan politik negara. Geopolitik kritis berargumen bahwa dalam pemahamannya secara klasik, geopolitik secara terselubung memproyeksikan asumsi-asumsi kultural dan politiknya sendiri dalam praktik pemetaan politik dunia (Tuathail, 1999). Terdapat hubungan-hubungan kekuatan dalam geopolitik yang tidak terlihat dan tidak diakui dalam kajiannya.

Geopolitik kritis juga mempertanyakan kemampuan preskriptif geopolitik terhadap kebijakan yang didasarkan pada asumsi bahwa ruang dan teritori memiliki signifikansi strategik. Pertanyaan tersebut muncul karena pandangan bahwa segala bentuk pengetahuan adalah selalu merupakan pengetahuan yang tersituasi dan mengartikulasikan perspektif subjek dan budaya tertentu dan memarginalkan subjek dan budaya lain (Tuathail, 1999). Pandangan tersebut semakin tidak relevan menghadapi kondisi geopolitik kontemporer yang telah melampaui pemahaman biner dan '*either-or*' mengenai ruang dan teritori yang mendominasi geopolitik klasik, terutama dengan perkembangan teknologi informasi yang semakin menghapuskan batasan-batasan antar-negara. Selain itu, geografi juga tidak dapat dilihat sebagai sebuah sub-stratum pengetahuan yang konstan, namun merupakan bentuk pengetahuan historis dan sosial mengenai bumi. Sehingga, geopolitik perlu dipahami sebagai problematika yang lebih luas dan kompleks dibandingkan dengan yang dipahami secara klasik, menjadikan generalisasi mengenai konsep-konsep geografis sulit dilakukan tanpa mengesampingkan faktor-faktor tertentu. Geopolitik kritis bukanlah hanya suatu bentuk 'geopolitik' yang berupaya untuk memengaruhi praktik-praktik politik, namun juga merupakan praktik yang memiliki kesadaran politik yang juga mengkaji secara eksplisit politik yang ada dalam kondisi geopolitik kontemporer (Tuathail, 1999).

Gearóid Ó Tuathail (1999) menulis bahwa geopolitik kritis membagi geopolitik menjadi empat jenis utama, geopolitik formal, praktis, populer, dan struktural. Geopolitik formal mengacu pada apa yang umumnya dipahami sebagai pemikiran atau tradisi geopolitik, sedangkan geopolitik praktis mengacu pada politik geografis yang secara umum dapat ditemukan dalam praktik kebijakan luar negeri sehari-hari. Geopolitik populer mengacu pada politik geografis yang dibentuk dan diperdebatkan oleh berbagai budaya populer yang membentuk media, dan geopolitik struktural mengkaji proses dan tendensi struktural yang mengkondisikan bagaimana negara melakukan praktik kebijakan luar negeri. Dalam penelitian ini, penekanan diberikan terhadap hubungan antara geopolitik formal dan praktis. Penelitian ini dilakukan berdasarkan argumen mengenai hubungan antara ide dan praktik dalam geopolitik, yakni bahwa praktik geopolitik – dalam bentuk perumusan dan implementasi kebijakan luar negeri – dibentuk dengan berdasarkan pada ide-ide geopolitik yang dirumuskan, disetujui dan didukung oleh elit-elit politik dan akademisi, dan yang berperan sebagai penjamin legitimasinya. Ide-ide geopolitik tersebut dapat menjamin legitimasi kebijakan karena telah dinilai sesuai dengan suatu identitas kolektif atau identitas nasional. Penelitian ini

berupaya untuk melihat apakah model yang menjelaskan proses dan mekanisme yang mengaitkan ide dengan praktik kebijakan luar negeri, sebagaimana yang diformulasikan oleh Anne L. Clunan (2009, 33) mengenai identitas Rusia pos-Soviet dengan kebijakan luar negeri yang dibentuk, juga berlaku dalam konteks diskursus geopolitik.

Type of Geopolitics	Object of Investigation	Problematic	Research Example
Formal Geopolitics	Geopolitical thought and the geopolitical tradition	Intellectuals, institutions and their political and cultural context	Halford Mackinder, his geopolitical theories and imperialist context
Practical Geopolitics	The everyday practice of statecraft	Practical geopolitical reasoning in foreign policy conceptualization	'Balkanism' and its influence over US foreign policy towards Bosnia
Popular Geopolitics	Popular culture, mass media, and geographical understandings	National identity and the construction of images of other peoples and places.	The role of mass media in projecting images of Bosnia into Western livingrooms
Structural Geopolitics	The contemporary geopolitical condition	Global processes, tendencies and contradictions	How globalization, informatization and risk society condition/transform geopolitical practices

The Types of Geopolitics Studied by Critical Geopolitics (Tuathail, 1999)

Istilah geopolitik formal digunakan untuk mengacu pada pemikiran-pemikiran dan tradisi geopolitik, sehingga dapat dikatakan memiliki kaitan yang erat dengan geopolitik klasik sebagai bentuk kajian geopolitik yang pertama muncul dan memiliki pengaruh yang formatif terhadap bagaimana geopolitik dikaji dan disusun. Ketika berbicara mengenai pemikiran dan tradisi geopolitik, pembentuk strategi mengacu pada tokoh-tokoh geopolitik klasik dengan pemikiran-pemikiran geopolitik mereka antara lain Alfred Thayer Mahan, Halford Mackinder, Friedrich Ratzel, Rudolf Kjellen, dan lain-lain, serta pemikir-pemikir geopolitik yang lebih kontemporer dengan konsep-konsep geopolitik yang muncul pada periode perang atau inter-war, seperti Karl Haushofer, Nicholas Spykman, Henry Kissinger, Zbigniew Brzezinski (Tuathail, 1999). Maka itu, geopolitik formal dipandang sebagai ranah pemikir strategik dan intelektual publik, merupakan sistem ide dan prinsip yang terkodifikasi dengan jelas dan digunakan dalam mengarahkan aktivitas kenegaraan (Tuathail & Agnew, 1992).

Geopolitik praktis, kontras dengan geopolitik formal yang didominasi oleh teori-teori dan visi-visi grand strategy yang dibentuk oleh kelompok intelektual, merupakan bentuk pertimbangan geopolitik yang lebih bersifat praktis dan pragmatis (Tuathail, 1999). Geopolitik praktis merupakan bagian dari diskursus sehari-hari yang awam dan informal yang dimanfaatkan oleh pembuat kebijakan luar negeri untuk membentuk makna-makna spasial tertentu dari kondisi dunia, secara implisit memanfaatkan pengetahuan geografis yang diwariskan untuk menjadi kerangka bagi pertanyaan-pertanyaan tertentu dalam konteks diskursus geografis kultural (Tuathail, 1999). Logika geopolitik praktis, berbeda dari geopolitik formal, cenderung lebih bersifat *common-sense* dan bergantung pada narasi-narasi dan distingsi dalam kategori-kategori biner yang dapat ditemukan dalam mitologi masyarakat (Tuathail & Agnew, 1992). Geopolitik praktis juga

dikatakan melibatkan cara-cara intelektual kenegaraan membentuk pemahaman-pemahaman spasial mengenai politik internasional, merepresentasikannya sebagai kenyataan mengenai 'dunia' yang dicirikan dengan jenis-jenis tempat, masyarakat, dan konflik tertentu. Dalam kata lain, geopolitik praktis merupakan bentuk operasional dari konsep-konsep geopolitik yang lebih formal.

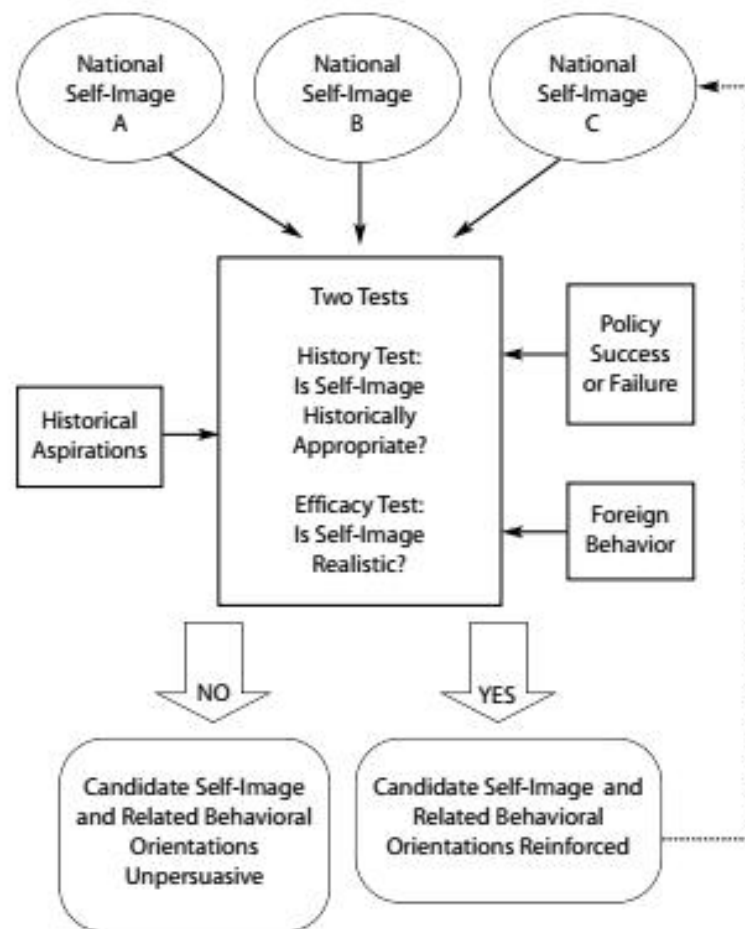
Distingsi yang dibuat oleh Tuathail mengenai geopolitik formal dan praktis tersebut membantu dalam mengkategorisasi kajian geopolitik, dimana kajian geopolitik dalam ranah akademis sebagai geopolitik formal dan kajian geopolitik dalam ranah praktik kenegaraan sebagai geopolitik praktis dikenali sebagai dua hal yang berbeda secara karakteristik maupun fungsi. Geopolitik praktis berkaitan dengan, dan dipengaruhi oleh, kajian geopolitik secara formal, bagaimanapun bentuk kaitan tersebut tidak disentuh maupun dijelaskan lebih lanjut. Mekanisme kausal spesifik yang menjelaskan bagaimana konsep-konsep dalam diskursus geopolitik formal kemudian dapat memengaruhi pembuatan kebijakan dan geopolitik secara praktis belum diketahui.

Bagaimanapun, sudut pandang konstruktivis dalam Hubungan Internasional sedikit banyak dapat menjelaskan hubungan kausal antara ide dan praktik dengan lebih komprehensif. Konstruktivisme aspirasional, sebagaimana ditulis oleh Anne L. Clunan (2009), menjabarkan hubungan yang *co-constitutive* antara budaya dan aspirasi dengan kebijakan yang dibuat oleh elit politik, dimana kebijakan yang dibentuk elit politik didasarkan pada dan dipengaruhi oleh aspirasi dan memori historis tertentu yang membentuk identitas negara. Kaitan antara aspirasi dan kebijakan tersebut menjelaskan bagaimana identitas dan kepentingan negara terbentuk melalui suatu proses yang dapat dianalisis, bukan hasil diskrit dari struktur-struktur yang berlaku terhadap aktor (Clunan, 2009).

Orientasi kebijakan luar negeri negara didasarkan pada kepentingan nasional. Kepentingan nasional dibentuk berdasarkan ide-ide tertentu yang diidentifikasi oleh elit negara sebagai tujuan politik negara dan statusnya dalam sistem internasional. Di sisi lain, identifikasi tersebut juga dibentuk dari legitimasi yang telah terbentuk di masa lalu (Clunan, 2009). Secara sederhana, argumen konstruktivisme aspirasional menyatakan bahwa aspirasi nasional dikembangkan oleh anggota elit negara berdasarkan memori historis yang dimiliki secara kolektif. Aspirasi berperan dalam membentuk self-image negara, dimana self-image yang dibentuk dan didukung elit negara dapat bervariasi dan secara implisit dapat digunakan untuk mencapai kepentingan yang juga beragam. Terdapat kompetisi antara beragam self-image tersebut dalam diskursus politik, karena self-image dapat menentukan bagaimana tujuan politik dan peran suatu negara dalam panggung internasional dipersepsikan. Dapat dikatakan bahwa self-image negara tertentu dapat mendikte identitas nasional yang kemudian dapat menentukan dan kepentingan nasional, sehingga menjadi objek kontestasi dalam diskursus politik dan terutama di antara elit politik yang ingin mencapai kepentingan tertentu (Clunan, 2009).

Konstruktivisme aspirasional menyediakan model yang dapat menjelaskan mekanisme bagaimana ide dapat memengaruhi kebijakan dan proses-proses yang terlibat di dalamnya, dengan menjelaskan bahwa ide membentuk identitas nasional yang kemudian diinterpretasi atau dijadikan justifikasi oleh elit pemerintahan atau pembuat kebijakan lain dalam menentukan apa yang menjadi kepentingan nasional (Clunan, 2009). Identitas nasional, layaknya identitas kolektif lain pada umumnya, sifatnya tidak permanen atau stagnan, melainkan secara berkelanjutan dikonstruksi dan direkonstruksi oleh politisi, intelektual, dan

representatif media melalui ide, nilai, dan simbol-simbol yang digunakan. Dalam hal ini, self-image nasional berperan besar dalam membentuk identitas nasional, hingga akhirnya dalam mekanisme pembentukan kebijakan. Suatu self-image nasional tertentu dapat menjadi dominan dalam diskursus politik apabila terdapat kesesuaian baik dengan aspirasi historis maupun dalam aplikasinya secara praktik, dimana kesesuaian tersebut berimplikasi pada kemampuannya untuk dapat meyakinkan sebanyak mungkin orang atas kenaturalan dan ketepatannya, dan secara konsekuen legitimasinya (Clunan, 2009). Self-image nasional yang dominan diseleksi melalui proses ujian korespondensi yang dilakukan oleh elit politik dengan melibatkan efficacy and historical tests yang menguji kesesuaian historis dan efektifitas self-image berdasarkan tiga faktor: aspirasi historis yang dimiliki secara intersubjektif, kegagalan atau keberhasilan kebijakan, dan persepsi yang terbentuk mengenai perilaku negara lain.



Correspondence Testing: How a National Self-Image Becomes Dominant (Clunan, 2009)

Self-image nasional, ketika telah menjadi *self-image* yang dominan setelah melalui proses tes historis dan efektifitas, kemudian menentukan kepentingan nasional. Apabila dominasi tersebut bertahan dan semakin menyebar, *self-image* tersebut dapat menjadi identitas nasional yang mendasari suatu struktur sosial kolektif. *Self-image* nasional yang dominan tersebut tetap menghadapi ujian historis dan efektifitas, dan sebagai hasilnya, berubah, diperkuat dan ditolak dalam proses yang serupa. Konstruktivisme aspirasional menyediakan suatu model yang dapat menjelaskan kaitan antara ide dan praktik dan bentuk mekanisme

diskrit yang menghubungkan satu dengan yang lainnya. Model yang digunakan dalam konstruktivisme aspirasional dapat menjelaskan proses bagaimana konsep-konsep yang muncul dalam ranah ideasional diimplementasikan secara praktis, serta bahwa perumusan dan praktik kebijakan tidak terlepas dari pengaruh ide-ide yang dibentuk oleh suatu kelompok. Maka itu, kerangka konstruktivisme aspirasional tersebut dijadikan dasar dari penelitian ini.

Permasalahan yang menjadi subjek penelitian ini secara garis besar merupakan permasalahan konseptual. Analisis yang dilakukan dalam penelitian ini secara garis besar juga lebih dititikberatkan pada analisis terhadap teori dan konsep, namun objek penelitian yang diteliti, yakni geopolitik formal serta praktik, menuntut penggunaan pendekatan-pendekatan yang lebih empirik. Untuk menjangkarkan penelitian ini secara empirik, digunakan pendekatan studi kasus. Metode studi kasus dipilih antara lain karena kelebihan-kelebihan yang dimilikinya dibandingkan dengan metode-metode penelitian lain dalam menjawab pertanyaan penelitian ini. Studi kasus memiliki potensi untuk mencapai validitas konseptual yang lebih tinggi, dimana validitas konseptual dinilai dari cara mengukur indikator konsep-konsep teoritik yang menjadi objek penelitian (George & Bennet, 2005). Ide-ide dan praktik geopolitik yang menjadi objek penelitian ini, seperti halnya variabel-variabel kebanyakan penelitian ilmu sosial lain, dalam pengukurannya memerlukan pertimbangan yang rinci mengenai faktor-faktor kontekstual yang umum dalam studi kasus. Selain itu, metode studi kasus memiliki kapasitas untuk memaparkan kompleksitas hubungan kausal (George & Bennett, 2005). Metode studi kasus berguna dalam mengidentifikasi beragam variabel yang mengintervensi dan membantu untuk mengenali kondisi-kondisi apa yang ada dalam suatu kasus yang menyebabkan mekanisme kausal. Dalam penelitian ini, studi kasus menjadi penting untuk menelusuri proses pembentukan kebijakan luar negeri untuk mencari tahu kaitan dengan ide-ide geopolitik.

Terdapat dua objek kajian empiris dalam studi kasus penelitian ini, yang masing-masing merepresentasikan aspek ide dan praktik geopolitik yang dianalisis. Ide geopolitik yang dikaji adalah Neo-Eurasianisme, spesifiknya dalam kaitannya dengan pandangan mengenai Rusia sebagai bagian dari suatu peradaban Eurasia dan sebagai aktor pemersatu bangsa Eurasia melawan kelompok Atlantisis (Dugin, 2014). Konsep-konsep Neo-Eurasianisme yang dikaji dalam penelitian ini difokuskan pada pemikiran-pemikiran dan tulisan-tulisan Aleksandr Dugin sebagai ideolog utama Neo-Eurasianisme dalam diskursus politik Rusia kontemporer, serta sebagai penghubung antara kajian formal Neo-Eurasianisme dengan praktik kebijakan Rusia dengan posisinya sebagai penasihat pembentuk kebijakan Rusia (Dunlop, 2004). Sedangkan praktik geopolitik yang dikaji adalah aneksasi Krimea oleh Rusia pada tahun 2014, yang merupakan kebijakan pemerintah Rusia untuk mengambil alih wilayah Semenanjung Krimea dan Kota Sevastopol dari Ukraina, menyusul kerusuhan di Kiev (yang kemudian dikenal sebagai Euromaidan) dan diberhentikannya Presiden Ukraina, Viktor Yanukovych. Kedua objek penelitian tersebut dipilih sebagai studi kasus karena dinilai bisa membantu menjelaskan kaitan antara ide-ide geopolitik yang muncul secara formal dengan kebijakan luar negeri yang dibuat sebagai implementasi geopolitik praktis secara kausal, karena terdapat hubungan yang jelas dan dapat dikaji antara perkembangan diskursus Neo-Eurasianisme dengan pembuatan kebijakan luar negeri Rusia. Kasus tersebut dalam kaitannya dengan ide-ide mengenai Neo-Eurasianisme dianggap sebagai kasus yang tipikal (Gerring, 2008). Analisis dilakukan dengan menggunakan teknik analisis diskursus, dengan tujuan memetakan kaitan antara faktor-faktor materiil dengan faktor-faktor ideasional secara diskursif (Hansen, 2006). Dalam penelitian ini, faktor-faktor materiil yang dilihat adalah dalam diskursus resmi pemerintah Rusia dalam kaitannya dengan aneksasi Krimea pada tahun 2014,

sedangkan faktor ideasional direpresentasikan oleh diskursus akademis mengenai Neo-Eurasianisme Aleksandr Dugin.

Untuk mencari tahu relasi kausal antara ide dan praktik geopolitik, kedua aspek tersebut dipahami sebagai dua kategorisasi pemikiran geopolitik yang diskrit – geopolitik formal sebagai ranah ideasional dan geopolitik praktis sebagai ranah praktikal. Menggunakan model konstruktivisme aspirasional Anne Clunan (2009), dapat terbentuk suatu model mekanisme yang dapat menjelaskan proses bagaimana ide-ide geopolitik formal berkaitan dengan geopolitik praktis, yang berarti bahwa ide geopolitik yang bersifat formal dipahami sebagai self-image nasional yang dominan dan mendefinisikan kepentingan negara, yang kemudian dicapai melalui kebijakan luar negeri yang didasari oleh reasoning geopolitik praktis. Dalam penelitian ini ide geopolitik formal yang dianalisis adalah Neo-Eurasianisme, dan sejalan dengan teori konstruktivisme aspirasional, Neo-Eurasianisme dianalisis sebagai salah satu self-image nasional dalam diskursusu politik Rusia.

Konstruktivisme aspirasional merupakan cabang pemikiran konstruktivis dalam Hubungan Internasional yang berbeda dari pemikiran-pemikiran konstruktivis lainnya, antara lain karena konstruktivisme aspirasional didasarkan pada pengertian dari bidang ilmu psikologi sosial. Teori-teori mengenai identitas sosial merupakan bagian dari asas konsepsi konstruktivisme aspirasional mengenai identitas nasional. Menurut teori identitas sosial, suatu identitas kolektif terbentuk karena adanya kebutuhan psikologis akan distingsi positif (Clunan, 2009). Distingsi positif tersebut dalam konstruktivisme aspirasional disebut *self-esteem*, yang dibangun oleh kelompok masyarakat dengan merujuk pada sejarah dan pengalaman mereka sebagai sebuah kolektif dan kemudian digunakan untuk merumuskan aspirasi-aspirasi untuk masa depan. Aspirasi tersebut meliputi keinginan untuk mempertahankan self-esteem yang positif dan memperbaiki *self-esteem* yang negatif. Kebutuhan manusia akan *self-esteem* yang positif tersebut terpenuhi ketika manusia telah menjadi bagian dari suatu kategori sosial yang dinilai positif dan disting – dalam kasus ini suatu bangsa. Konstruktivisme aspirasional dibangun berdasarkan logika bahwa aspirasi memiliki peran yang penting dalam menentukan warisan sejarah yang mana yang diinkorporasikan ke dalam identitas nasional, dan kemudian menentukan kepentingan nasional (Clunan, 2009). Dalam kata lain, menurut model konstruktivisme aspirasional, ide-ide mengenai identitas nasional yang berkembang dalam diskursus politik berpengaruh dalam menentukan identitas nasional, kepentingan negara, dan akhirnya kebijakan.

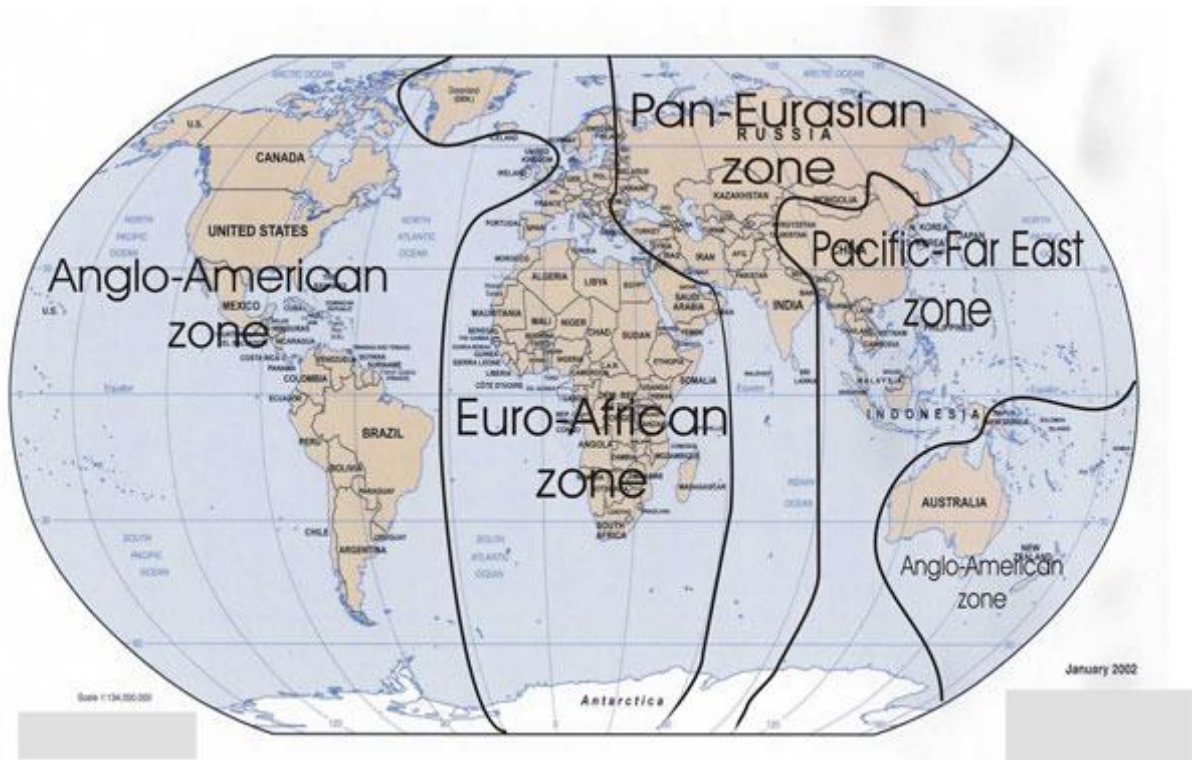
Berbagai aspek dari karakteristik dan kualitas yang dimiliki negara kemudian dapat mendasari suatu konsep identitas nasional, tidak terkecuali ide-ide geopolitik. Realita geopolitik sebagai dasar identitas nasional sendiri bukan merupakan konsep yang sepenuhnya baru, sebagaimana yang ditulis oleh Gertjan Dijkink (2002), bahwa konteks ruang dan waktu mengondisikan manusia, maka masyarakat di suatu negara dalam suatu era yang sama cenderung akan memiliki pandangan yang sama baik mengenai dirinya sendiri maupun entitas lain. Dengan hidup di suatu tempat, manusia menjadi terekspos terhadap diskursus yang diproduksi masyarakat lokal dan mengalami kejadian yang berbeda dari apa yang terjadi di tempat lain, sehingga dapat dikatakan tiap-tiap bangsa memiliki identitas yang berbeda karena tiap-tiap bangsa ‘mengalami’ geografi dengan cara yang disting dari satu sama lain (Dijkink, 2002). Membangun dari konsep tersebut, ide-ide geopolitik mengenai suatu bangsa atau negara, dalam penelitian ini Neo-Eurasianisme, dapat dilihat sebagai suatu bentuk identitas kolektif.

Dalam konteks konstruktivisme aspirasional Neo-Eurasianisme merupakan self-image nasional karena terminologi identitas nasional merujuk pada self-image nasional yang telah lolos dari *history* dan *efficacy test* dan diwujudkan dalam bentuk perilaku negara atau kebijakan. *Self-image* nasional dalam konstruktivisme aspirasional merujuk pada konsep identitas nasional yang terbentuk berdasarkan pandangan negara mengenai dirinya sendiri dalam konteks pengalaman historis (Clunan, 2009). Kontras dengan definisi identitas yang berdasarkan pada suatu *other-image*, dimana identitas dibentuk dari proyeksi pandangan aktor eksternal mengenai diri atau dari konformitas aktor terhadap norma internasional yang dominan, self-image nasional sepenuhnya bersifat internal atau memandang kedalam. Self-image nasional terdiri atas dua pilar utama: ide mengenai tujuan politik dan status internasional negara. Tujuan politik didefinisikan sebagai apa yang dipahami sebagai sistem pemerintahan dan misi negara yang dianggap patut, sedangkan status internasional negara merujuk pada peringkat, hak dan obligasi negara pada level internasional (Clunan, 2009). Berdasarkan dua pilar utama tersebut, self-image nasional dapat dipahami sebagai memiliki elemen deskriptif (*what a country should be*) dan preskriptif (*what a country should do*). Bagaimanapun, tidak hanya berhenti sampai di sana, suatu self-image nasional sebagai salah satu bentuk identitas sosial juga memerlukan dimensi evaluatif dalam bentuk strategi-strategi behavioral untuk manajemen identitas, yang dapat membantu mencapai atau mempertahankan pandangan positif mengenai identitas sosial. Ide geopolitik Neo-Eurasianisme didefinisikan dalam dua kategori, pandangannya mengenai tujuan politik Rusia dan status internasional Rusia.

Dalam pandangan Neo-Eurasianis, tujuan politik Rusia dipahami sebagai produk dari wilayah geografisnya yang disting, yang kemudian mendikte apa yang dipahami sebagai batas teritorial dan misi nasional Rusia. Visi Neo-Eurasianis cenderung memperbesar batas teritorial Rusia, karena pemikiran neo-Eurasianis dibangun berdasarkan pemikiran-pemikiran geopolitik klasik, dengan penekanan lebih terhadap kerangka pemikiran geopolitik Halford Mackinder. Neo-Eurasianisme membagi politik internasional ke dalam dua blok geopolitik besar: Eurasia, sebagai blok kontinental yang berpusat di Rusia, dan Atlantisisme, yang merepresentasikan blok maritim dengan Amerika Serikat sebagai pemimpin dalam blok tersebut (Dugin, 2014). Kedua blok tersebut dipersepsikan sebagai saling bertentangan, baik secara aktif maupun pasif. Lebih lanjut, oposisi Eurasianisme dan Atlantisisme merupakan representasi dari pergumulan transendental antara Timur dan Barat secara luas (Dugin, 2014). Eurasia dan peradaban Barat dipandang memiliki perbedaan-perbedaan fundamental yang tidak dapat dikonsolidasikan, perbedaan-perbedaan yang menyebabkan peradaban Barat memiliki tendensi untuk bersikap keji dan hostile terhadap kesejahteraan nasional dan integritas Eurasia secara umum (Bassin, 2008). Karena alasan tersebut peradaban Barat dipandang sebagai tantangan dan ancaman terbesar yang dihadapi oleh Eurasia. Hal tersebut juga didukung oleh definisi yang lebih sempit dan spesifik dari Neo-Eurasianisme, berkaitan dengan konsep tradisional mengenai Eurasia sebagai “Old World”, yakni sebuah ruang multi-peradaban yang dihuni oleh berbagai negara, bangsa, budaya, etnisitas, dan agama yang saling berkaitan dengan satu sama lain secara historis maupun geografis berdasarkan suatu takdir dialektik (Dugin, 2014). Masih sejalan dengan prinsip-prinsip Neo-Eurasianisme yang secara inheren anti-Atlantis, “Old World” yang direpresentasikan oleh Neo-Eurasianisme seringkali dipahami sebagai oposisi dari “New World” yang direpresentasikan oleh Amerika Serikat dan Eropa Barat. Keduanya dipahami dalam konteks dualisme: antara lama-baru, organik-artifisial, dan historis-teknis (Dugin, 2014). Klaim Neo-Eurasianisme adalah bahwa globalisasi dan universalisme nilai-nilai Amerika Serikat yang merepresentasikan “New World” tidak hanya mengikis kebudayaan dan peninggalan “Old World”,

namun juga telah mengambil alih budaya dan peradaban-peradaban lain di dunia dalam rangka menguniversalisasi budaya dan peradaban Amerika. Budaya-budaya yang paling terdampak oleh dalam hal ini adalah budaya-budaya Timur, khususnya Asia, yang dipandang arkaik, berprasangka, dan kuno berdasarkan standar Amerika Serikat (Dugin, 2014).

Dalam konteks ini, Neo-Eurasianisme merupakan proyek pengintegrasian wilayah benua Eurasia secara strategik, geopolitik, dan ekonomi (Dugin, 2014). Sebagaimana pembentukan Uni Eropa telah mendukung Eropa mengembalikan statusnya sebagai world power yang dapat mengimbangi Amerika Serikat, demikian pula “Old World” dapat merespon dan mengimbangi dominasi “New World” (Dugin, 2014). Neo-Eurasianisme memandang integrasi wilayah benua Eurasia sebagai penjamin kedaulatan, keamanan, dan kebebasan baik bagi Rusia maupun Eurasia secara keseluruhan dalam tatanan internasional yang cenderung unipolar dan didominasi Atlantisme Amerika Serikat. Neo-Eurasianisme membagi wilayah-wilayah di dunia menjadi empat sabuk geografis vertikal, atau zona meridian, dari Utara ke Selatan.



Map of multipolar world. Four zones - four poles

Map of Multipolar World (Dugin, 2014)

Zona Anglo-Amerika mencakup kedua bagian dari benua Amerika beserta Australia, dan dikontrol oleh Amerika Serikat dalam lingkup kerangka Monroe Doctrine. Ketiga zona yang lain adalah zona Euro-Afrika, Rusia-Asia Tengah (atau Pan-Eurasia), dan Pasifik-Timur jauh –Masing-masing saling mengimbangi satu sama lain, dan ketiganya bersamaan mengimbangi zona meridian Atlantik yang dikontrol oleh Amerika Serikat (Dugin, 2014).

Selain dalam menentukan batas teritorial, Neo-Eurasianisme sebagai *self-image* nasional juga dilihat dari definisi misi nasional Rusia dalam konsepnya. Misi nasional Rusia berasal dari keunikan wilayah geografis Rusia yang merupakan

aspek yang sentral dalam pemikiran Eurasianis. Keunikan tersebut berasal dari pandangan bahwa secara geografis Rusia menempati posisi yang dualistis, di tengah-tengah Eropa dan Asia. Karena posisinya yang unik, budaya Rusia merupakan kebudayaan disting dan unik, sebagai produk dari perpaduan antara bangsa Slavik dan Turko-Muslim (Laruelle, 2008). Lebih jauh, hal tersebut berarti kebudayaan Rusia terdiri atas aspek-aspek dari Barat dan Timur, namun di saat yang bersamaan juga tidak dapat direduksikan ke dalam salah satu dari keduanya, dalam kata lain Rusia merupakan bagian dari entitas Eurasia yang orisinal (Dugin, 2014). Wilayah Eurasia, spesifiknya yang tercakup dalam batas wilayah bekas Uni Soviet, dipandang telah membentuk suatu “individu geografis” yang organik dan kohesif secara politis, sosial, dan kultural karena adanya keseragaman dalam aspek geografis fisik yang alamiah (Bassin, 2008).

Dalam Eurasianisme, teritori dipandang sebagai elemen yang memiliki signifikansi materiil, yang berarti takdir suatu bangsa ditentukan oleh lokasi geografis yang ditempatinya (Laruelle, 2015). Sehingga, kohesi geografis yang dimiliki oleh Benua Eurasia tersebut dapat menjadi dasar bagi terbentuknya suatu identitas kebangsaan Rusia yang didefinisikan oleh geografi Eurasia. Wilayah Benua Eurasia dalam konsepsi neo-Eurasianisme kemudian menjadi sangat penting, karena identitas Rusia menjadi sangat terikat dengan survivalitas dan integritas wilayah Eurasia. Dalam pandangan Neo-Eurasianis, hal tersebut juga didukung dengan pandangan mengenai kontinuitas geopolitik dari Kievan Rus, Golden Horde, Ketsaran Rusia, Kekaisaran Rusia, Uni Soviet, hingga Federasi Rusia di era kontemporer (Dugin, 2012). Dari zaman kuno, pemerintahan Rusia dalam berbagai bentuknya mulai terbentuk di Heartland Eurasia, kemudian berekspansi secara bertahap untuk mencakup keseluruhan wilayah Eurasia. Dalam konsep ini, Rusia dipahami sebagai memiliki kapasitas lebih dan bahkan takdir khusus sebagai aktor yang sentral dan menghegemon di Eurasia. Pandangan Eurasianis tersebut menawarkan sudut pandang alternatif untuk memahami posisi Rusia dalam percaturan politik global, dengan menolak pandangan lebih mainstream mengenai Rusia sebagai aktor di periferi Eropa, dan sebaliknya menganggap Rusia memiliki dasar untuk memosisikan diri sebagai sosok “messiah” yang akan mempersatukan Eurasia (Laruelle, 2008). Pandangan tersebut didukung oleh proponent Neo-Eurasianisme, Aleksandr Dugin dalam bukunya, *Last War of the World-Island*:

“Geopolitically, Russia is something more than the Russian Federation in its current administrative borders. The Eurasian civilization, established around the Heartland with its core in the Russian narod is much broader than contemporary Russia. To some degree, practically all the countries of the Commonwealth of Independent States (CIS) belong to it [...] Russia must take military control over the center of the zones attached to it, in the south and the west, and in the sphere of the northern Arctic Ocean”, (Dugin, 2012).

Untuk menyimpulkan, tujuan politik Rusia, sejalan dengan pemikiran Neo-Eurasianisme, dapat dilihat dari bagaimana batas teritorial dan misi nasional Rusia didefinisikan. Menurut konsep Neo-Eurasianis tujuan politik Rusia adalah untuk mengintegrasikan benua Eurasia, spesifiknya melalui reintegrasi bekas wilayah Uni Soviet menjadi satu ruang yang terunifikasi, dengan Rusia, yang memiliki distingsi geografis, menempati posisi pemimpin. Tujuan politik tersebut juga menghadirkan konsep outgroup dan ingroup utama, yakni Atlantis, sebagaimana direpresentasikan oleh Amerika Serikat, sebagai outgroup yang secara umum ditentang Rusia, dan Eurasia, sebagai *ingroup* yang diaspirasikan oleh Rusia.

DAFTAR PUSTAKA

- Agnew, John, 2003: *Geopolitics: Re-visioning World Politics*, 2nd edn. Routledge, London.
- Agnew, John & Corbridge, Stuart. 2003. *Mastering Space: hegemony, territory, and international political economy*. Routledge: London.
- Bassin, M. 2008. *Eurasianism "Classical" and "Neo": the lines of continuity*. na.
- Bassin, Mark, and Pozo, Gonzalo (eds.). 2017. *The Politics of Eurasianism: Identity, Popular Culture and Russia's Foreign Policy*. London, UK: Rowman & Littlefield, 2017. ISBN: 978-1-78660-161-2." (2018): 302-304.
- Belsey, Catherine. 2002. *Poststructuralism: A Very Short Introduction*. Oxford: Oxford University Press.
- Biersack, John & O'Lear, Shannon. 2014. "The geopolitics of Russia's annexation of Crimea: narratives, identity, silences, and energy", *Eurasian Geography and Economics*, 55:3, 247-269.
- Clunan, Anne L. 2009. *The Social Construction of Russia's Resurgence: Aspirations, Identity, and Security Interests*. Baltimore: The Johns Hopkins University Press.
- Clover, Charles. 1999. "Dreams of the Eurasian Heartland: The Reemergence of Geopolitics". *Foreign Affairs*, Vol. 78, No. 2 (Mar.-Apr., 1999).
- Council on Foreign Relations. 2014. "Ukraine in Crisis", *Council on Foreign Relations*. <https://www.cfr.org/background/ukraine-crisis> [diakses 13 Juni 2018].
- Dalby, Simon. 1991. "Critical Geopolitics: Discourse, Difference, and Dissent". *Environment and Planning D: Society and Space*, Volume: 9 issue: 3.

- _____. 2010. "Recontextualising violence, power and nature: The next twenty years of critical geopolitics?", *Political Geography*, 29 (5): 280-288.
- Dijkink, Gertjan. 2002. *National Identity and Geopolitical Visions: Maps of Pride and Pain*. London & New York: Routledge.
- Dittmer, J., & Dodds, K. 2008. Popular geopolitics past and future: Fandom, identities and audiences. *Geopolitics*, 13(3), 437-457.
- Diuk, N. 2014. EUROMAIDAN: Ukraine's self-organizing revolution. *World Affairs*, 176(6), 9-16.
- Dodds, K. J. 1993. "Geopolitics, Experts and the Making of Foreign Policy" *Area* Vol. 25, No. 1.
- _____. 1994. "Geopolitics and foreign policy: recent developments in Anglo-American political geography and international relations" *Progress in Human Geography*. Vol 18, No. 2.
- _____. 2001. "Political geography III: critical geopolitics after ten years." *Progress in human geography* 25.3 (2001): 469-484.
- Dodds, K. 2007. *Geopolitics: a very short introduction*. OUP Oxford.
- Dugin, Aleksandr. 1997. *The Foundations of Geopolitics*. Arktos.
- Dugin, Aleksandr. 2001. Theses of Dugin's address to the Political Conference of the Pan-Russian Social-Political Movement EURASIA. http://eurasia.com.ru/dugino103_eng.html
- Dugin, Alexander *Eurasian Mission: An Introduction to Neo-Eurasianism*. Arktos, 2014.
- _____. *Last war of the World-Island: the Geopolitics of contemporary Russia*. Arktos, 2015.

- Dunlop, John. 2004. "Russia's New -- and Frightening -- "Ism"". *Hoover Institution*.
<https://www.hoover.org/research/russias-new-and-frightening-ism> [diakses 3 Maret 2019].
- Fettweis, Christopher J. 2015. "On Heartlands and Chessboards: Classical Geopolitics, Then and Now", *Orbis* Vol. 59 issue 4.
- Flint, Colin. 2006. *Introduction to Geopolitics*. New York: McGraw-Hill
- George, Alexander L., dan Andrew Bennett. 2005. *Case Studies and Theory Development in the Social Sciences*. Cambridge, MA: MIT Press. Ch. 1.
- Gerring, John. 2008. "Case Selection for Case-Study Analysis: Qualitative and Quantitative Techniques," in Janet M. Box-Steffensmeier, Henry E. Brady and David Collier (eds.), *The Oxford Handbook of Political Methodology*. Oxford, UK: Oxford University Press, pp. 645-684.
- Guzzini, Stefano & Leander, Anna. 2006. *Constructivism and International Relations*. London & New York: Routledge.
- Gray, Colin S. 1999. "Inescapable geography." *The Journal of strategic studies* 22.2-3 (1999): 161-177.
- Hagan, Charles B. 1942. "Geopolitics." *the Journal of Politics* 4.4 (1942): 478-490.
- Hansen, Lene. 2006. *Security as Practice: Discourse analysis and the Bosnian war*. London: Routledge.
- Holdar S., 1992. The ideal state and the power of geography. The life-work of Rudolf Kjellén. *Political Geography* 11: 307–323.
- Kearns, G. 2003. "Imperial Geopolitics: Geopolitical Visions at the Dawn of the American Century", dalam J. Agnew, K. Mitchell, & G. Tuathail (eds.), *A Companion to Political Geography*, Ch. 12. Oxford: Blackwell Publishing
- Kelly, Phil. 2006. "A critique of critical geopolitics." *Geopolitics* 11.1 (2006): 24-53.

- _____. 2016. *Classical geopolitics: a new analytical Model*. Stanford University Press.
- Kristof, Ladis K. D. 1960. "The origins and evolution of geopolitics". *The Journal of Conflict Resolution* Vol. 4, No. 1, Mar., 1960.
- Kipp, J. W. 2002. Aleksandr Dugin and the ideology of national revival: Geopolitics, Eurasianism and the conservative revolution. *European Security*, 11(3), 91-125.
- Laudan, Larry. 1978. *Progress and Its Problems: Towards a Theory of Scientific Growth*. University of California Press.
- Larrabee, F. S. 2015. The Ukraine Crisis and European Security. *Implications for the United States and US Army*.
- Laruelle, Marlene. 2004. "The Two Faces of Contemporary Eurasianism: An Imperial Version of Russian Nationalism" *Nationalities Papers*, Vol. 32, No. 1, March 2004.
- Laruelle, Marlène. 2008. "Russian Eurasianism." *An ideology of empire*. Washington.
- _____. 2012. "Larger, higher, farther north... geographical metanarratives of the nation in Russia." *Eurasian Geography and Economics* 53.5 (2012): 557-574.
- _____. *Russia's Arctic strategies and the future of the Far North*. Routledge, 2015.
- Levy, Jack S. 2008. "Case Studies: Types, Designs, and Logics of Inference" *Conflict Management and Peace Science*, 25:1-18, 2008.
- Mackinder, Halford. 1904. "The geographical pivot of history", *The Geographical Journal*. Vol XXIII, No. 4.
- Mamadouh, Virginie D. 1998. "Geopolitics in the nineties: one flag, many meanings." *GeoJournal* 46.4 (1998): 237-253.
- Mazurek, Sławomir. 2002. "Russian eurasianism—historiosophy and ideology." *Studies in East European Thought* 54.1-2 (2002): 105-123.

- Mercille, Julien. 2008. "The radical geopolitics of US foreign policy: Geopolitical and geoeconomic logics of power". *Political Geography*, Vol. 27
- _____. 1998. "Critical Geopolitics and the 1950s Bomber Gap". *Geopolitics* 13:498-518.
- Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation. 2013. "Concept of the Foreign Policy of the Russian Federation". *The Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation*
- http://www.mid.ru/en/foreign_policy/official_documents/-/asset_publisher/CptICk B6BZ29/content/id/122186 [diakses 17 Juni 2019].
- _____. 2014. "Statement by the Russian Ministry of Foreign Affairs regarding the events in Ukraine". *The Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation*.
- http://www.mid.ru/en/web/guest/maps/ua/-/asset_publisher/ktn0ZLTvbbS3/content/id/73918 [diakses 17 Juni 2019].
- Morozova, Natalia. "Geopolitics, Eurasianism and Russian foreign policy under Putin." *Geopolitics* 14.4 (2009): 667-686.
- Müller, Martin. 2008. "Reconsidering the concept of discourse for the field of critical geopolitics- Towards discourse as language and practice" *Political Geography*, Vol. 27.
- Neumann, Iver, 2008. "Discourse Analysis", dalam Audie Klotz & Deepa Prakash (eds.), *Qualitative Methods in International Relations: A Pluralist Guide*. Hampshire: Palgrave Macmillan, hal. 161-77.
- Neumann, Iver B. & Heikka, Henrikki. 2005. "Grand Strategy, Strategic Culture, Practice: The Social Roots of Nordic Defence", *Cooperation and Conflict: Journal of the Nordic International Studies Association*. Vol. 40(1): 5-23.

- Owens, Mackubin T. 2015. In Defense of Classical Geopolitics
- Putin, Vladimir. 2014. "Address by President of the Russian Federation". *President of Russia* <http://en.kremlin.ru/events/president/news/20603> [diakses 16 Juni 2019].
- Sharp, Joanne P. 1993. "Publishing American identity: popular geopolitics, myth and The Reader's Digest." *Political Geography* Vol. 12, No. 6.
- _____. 1996. Hegemony, popular culture and geopolitics: the Reader's Digest and the construction of danger. *Political Geography*, 15(6-7), 557-570.
- Shekhovtsov, Anton, and Andreas Umland. 2009. "Is Aleksandr Dugin a Traditionalist?" Neo-Eurasianism" and Perennial Philosophy." *The Russian Review* 68.4 (2009): 662-678.
- Sloan, G. R. 1988. *Geopolitics in United States Strategic Policy, 1890-1987*. New York: St.Martin's.
- Sloan, Geoffrey & Gray, Colin S. 1999. "Why geopolitics?", *Journal of Strategic Studies*, 22:2-3
- Taylor, P.J. 2000. 'Geopolitics, Political Geography and Social Science,' in K. Dodds and D. Atkinson (eds.), *Geopolitical Traditions. A Century of Geopolitical Thought* (London: Routledge 2000) pp. 375–379
- Tuathail, Gearóid Ó. 1992. "Putting Mackinder in his place." *Political Geography*, Vol. 11, No. 1.
- Tuathail, G. Ó. 1996. *Critical geopolitics: The politics of writing global space* (Vol. 6). U of Minnesota Press.
- _____. 1992. 'The Bush Administration and the 'End' of the Cold War: A Critical Geopolitics of US Foreign Policy in 1989,' *Geoform* 23 (1992) p. 439.
- _____. 1994. "Problematizing Geopolitics: Survey, Statesmanship and Strategy", *Transactions of the Institute of British Geographers*, Vol. 19, No. 3 (1994), pp. 259.

_____. 1999. "Understanding critical geopolitics: Geopolitics and risk society"

Journal of Strategic Studies, 22:2-3, 107-124

Tuathail, Gearóid Ó. & Agnew, John. 1992. "Geopolitics and discourse: Practical geopolitical reasoning in American foreign policy." *Political Geography*, Vol. 11, No. 2.

Tuathail, Gearóid Ó., and Simon Dalby. 1998. *Rethinking geopolitics: towards a critical geopolitics*. Routledge, 1998.